

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA OTONOMI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2017-2019

Levy Febriyanti Elwarin¹, Khojanah Hasan², Marjani Akhmad Tahir³.

¹Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, Email;
elwarin.levhya@gmail.com

²Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, Email;
khojanahasan@gmail.com

³Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Widyagama Malang, Email;
Yaniahmadtahir@gmail.com

Presenting Author: elwarin.levhya@gmail.com

*Corresponding Author: elwarin.levhya@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana otsus terhadap belanja modal, populasi penelitian ini adalah seluruh kabupaten/kota di Provinsi Papua Barat tahun 2017-2019. Jenis data penelitian adalah data kuantitatif dan sumber datanya diambil dari website resmi Dirjen Perimbangan Keuangan dengan teknik analisis data deskriptif, asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi, (R²) dan uji T menggunakan SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) pendapatan daerah, dana alokasi umum dan otonomi khusus berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal, (2) dana alokasi umum secara parsial tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana otonomi khusus dan belanja modal.

Abstract

This study aims to determine the effect of regional original income, general allocation funds, special autonomy funds on capital expenditures, the population of this study is all districts/cities in West Papua Province in 2017-2019. The type of research data is quantitative data and the data source is taken from the official website of Director General of Fiscal Balance with descriptive data analysis techniques, classical assumptions, multiple linear regression analysis, coefficient of determination, (R²) and T test using SPSS 23. The results of this study indicate that (1) regional income, general allocation funds and special autonomy have a simultaneous effect on capital expenditures, (2) general allocation funds partially have no effect on capital expenditures.

Keywords: local revenue, general allocation funds, special autonomy funds and capital expenditures

PENDAHULUAN

Sektor publik merupakan bagian yang mempunyai peranan vital dalam hal pengelolaan keuangan negara. Sektor publik lebih ditujukan kepada pemenuhan kebutuhan publik. Sebelum mewujudkan pelayanan kepada publik, pemerintah daerah terlebih dahulu menyusun alokasi dan realisasi pada APBD. Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagaimana yang ada dalam pasal 1 Ayat (17) UU No. 33 Tahun 2004, merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan di setujui oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Otonomi yang berlaku di Indonesia menjelaskan bahwa hal tersebut menunjukkan bahwa daerah diberi kewenangan luas untuk mengatur dan mengurus daerahnya sendiri. Salah satu sumber pendapatan yang diperoleh daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. PAD bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mengoptimalkan potensi pendanaan daerah sendiri dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

DAU adalah salah satu komponen Dana perimbangan yang merupakan unsur penting dalam menunjang belanja daerah. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004, DAU adalah transfer dari pemerintah bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

Provinsi Papua Barat merupakan salah satu daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008. Dana otonomi khusus hanya diterima oleh daerah tertentu di Indonesia, yakni Aceh, Papua dan Papua Barat. Adapun tujuan utama dari pelaksanaan otonomi khusus adalah dapat mengurangi kesenjangan antara Barat dengan provinsi lainnya di Indonesia.

Dalam upaya pelayanan disektor publik untuk menciptakan kenyamanan masyarakat, Pemerintah daerah perlu meningkatkan kemandirian daerah. Untuk mewujudkan kemandirian daerah tersebut, perlu diberikan alokasi belanja yang besar untuk peningkatan layanan publik guna meningkatkan daya Tarik investor dalam rangka membuka usaha di daerah Harianto & Adi (2007). Pengeluaran anggaran dalam pencapaian pendapatan dalam laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah definisi Belanja Modal dari PP 71 Tahun 2010.

Motivasi penelitian ini yaitu perbedaan dari beberapa hasil penelitian terdahulu. Made Ari Juniawan, Ni Putu Santi Suryantini, (2018) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Margaretha Turot (2017), menyatakan bahwa PAD dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Venny Tria Vanesha, Selamat Rahmadi, Parmadi (2019) menyatakan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun demikian, secara parsial hanya DAU yang berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Berdasarkan penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil temuan, sehingga menjadi celah penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memperjelas bagaimana penerimaan daerah yang diantaranya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus mempengaruhi Belanja Modal.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas ada beberapa permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yakni, (1) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Papua Barat? (2) Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal di Provinsi Papua Barat? (3) Bagaimana pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal di Provinsi Papua Barat? Dan (4) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Provinsi Papua Barat?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini yaitu: (1) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal di Provinsi Papua Barat, (2) Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal Papua di Provinsi Barat, (3) Untuk mengetahui pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal pada di Provinsi Papua Barat, dan (4) Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal di Provinsi Papua Barat.

KAJIAN PUSTAKA

1. Otonomi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (diamandemen dengan UU No. 12 Tahun 2008) tentang Pemerintahan Daerah, arti dari “otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan”. Tujuan utama dari penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo dalam Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah (2002:46) adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Halim (2007:96) menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sektor pendapatan asli daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah (Baldrick, 2017: 23).

Pendapatan asli daerah (PAD) bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan asli daerah dikatakan baik untuk memenuhi pembiayaan pembangunan daerahnya apabila pencapaian persentasenya melebihi 70% dari total penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Carunia, 2017: 2).

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Dalam pasal 27 UU Nomor 33 Tahun 2004 mengatakan bahwa jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% (dua puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN

4. Dana Otonomi Khusus (DOK)

Dana otonomi khusus merupakan Dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Otonomi Khusus mulai diberlakukan di Provinsi Papua pada tahun 2002 berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, kemudian untuk Provinsi Papua Barat pemberlakuan otonomi khusus diberikan melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001.

5. Belanja Modal

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah asset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum. Belanja Modal digunakan untuk memperoleh asset tetap pemerintah daerah seperti peralatan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Made Ari Juniawan, Ni Putu Santi Suryantini (2018), yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal Kota dan Kabupaten di Provinsi Bali” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Penelitian Margaretha Turot, (2017) yang berjudul Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemeditasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja Modal sebagai Variabel Pemeditasi di Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat Tahun 2010-2014. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

Venny Tria Vanesha, Selamat Rahmadi, Parmadi (2019) dengan judul penelitian Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap belanja modal pada kabupaten/kota di Provinsi Jambi. Hasil penelitian menemukan bahwa secara simultan PAD, DAU, DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja modal. Namun demikian, secara parsial hanya Dana Alokasi Umum yang berpengaruh terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Jambi.

Hipotesis

- **Hubungan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Modal.**

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai untuk membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dalam meningkatkan pembangunan. Keuangan pemerintah daerah menentukan mampu atau tidaknya daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Mamuka dan Inggriani, 2014). Jaya dan Dwirandra (2014) menyebutkan bahwa PAD yang tinggi akan digunakan oleh pemda untuk memberikan

pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan belanja modal. Haryuli (2013) menyatakan pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap alokasi belanja modal, temuan ini dapat mengindikasikan bahwa besarnya PAD menjadi salah satu faktor penentu dalam menentukan belanja modal.

H1: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

- **Hubungan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal**

Penjelasan pada UU Nomor 33 tahun 2004 dikatakan bahwa Dana Alokasi Umum merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pemerintah daerah dapat menggunakan Dana Alokasi Umum untuk memberikan pelayanan publik yang direalisasikan dalam belanja modal (Verawaty, dkk., 2015). Menurut Mardiasmo (2004: 144), Dana Alokasi Umum dimaksudkan untuk menjaga pemerataan dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah, sehingga dalam pembagian Dana Alokasi Umum perlu memperhatikan beberapa hal antara lain potensi daerah, kebutuhan pembiayaan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah di daerah dan ketersediaan APBN. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh David & Priyo (2007) pada daerah kabupaten dan kota se Jawa – Bali menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Hal ini sependapat dengan penelitian Darwanto & Yulia (2007) dan Askam (2008) variabel Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap belanja modal. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa transfer Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat di manfaatkan pemerintah daerah untuk membiayai belanja modal.

H2: Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

- **Hubungan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal.**

Pemanfaatan Dana Otonomi Khusus provinsi Papua serta Provinsi Papua Barat di Prioritaskan untuk pendanaan pendidikan dan kesehatan, Infrastruktur dan ekonomi. Sedangkan hubungan antara belanja modal terhadap Dana otsus di sesuaikan dengan anggaran Dana otsus di kirim dari pusat ke daerah dan untuk mendanai kebutuhan daerah berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur guna mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Yusharto, 2018).

H3: Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

- **Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus Terhadap Belanja Modal.**

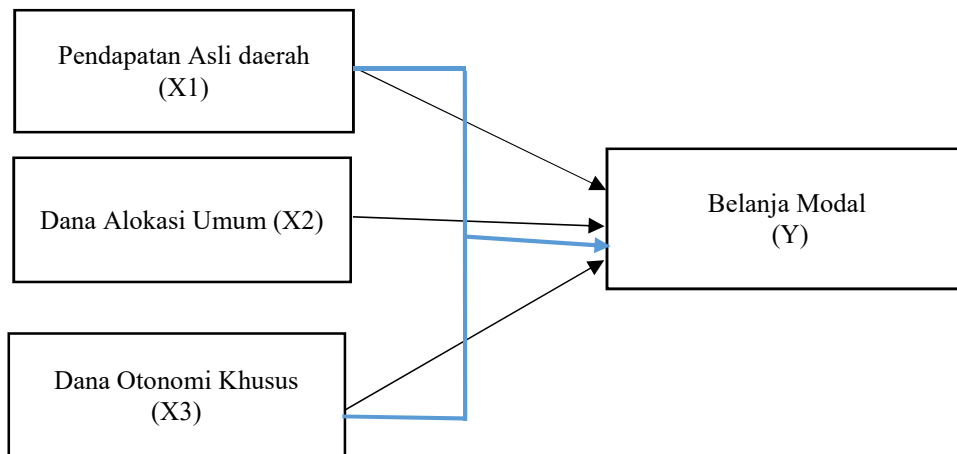
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki sumber keuangan yang memadai untuk membiayai pengeluaran daerahnya sendiri dalam meningkatkan pembangunan. Keuangan pemerintah daerah menentukan mampu atau tidaknya daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya (Mamuka dan Inggriani, 2014). Jaya dan Dwirandra (2014) menyebutkan Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan digunakan oleh pemda untuk memberikan pelayanan publik yang memadai sehingga dapat meningkatkan belanja modal. Bagian dari Dana Perimbangan serta menjadi sumber pendapatan dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi besarnya pengalokasian Belanja Modal suatu daerah adalah Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum dapat menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Semakin banyak Dana Alokasi Umum yang diterima berarti daerah tersebut masih sangat tergantung pada pemerintah pusat dalam memenuhi belanjanya.

Pemerintah pusat memberikan dana lainnya berupa dana otonomi khusus yang digunakan untuk pengeluaran daerah. Hubungan antara belanja modal terhadap Dana otsus di sesuaikan dengan anggaran Dana otsus yang di kirim dari pusat ke daerah dan untuk mendanai

kebutuhan daerah berdasarkan fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur guna mempercepat pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat (Yusharto, 2018). Dana otonomi khusus diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat dalam mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lainnya di Indonesia. Kewenangan yang dilakukan dalam hal mendengar aspirasi masyarakat, menetapkan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan, termasuk pengaturan dana untuk belanja modal.

H4: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif terhadap belanja modal.

Model konseptual



Keterangan:

- = Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y secara Parsial.
- = Pengaruh Variabel X terhadap Variabel Y secara Simultan.

METODE PENELITIAN

- **Pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif. Pendekatan analisis kuantitatif terdiri atas perumusan masalah, menyusun model, mendapatkan data, mencari solusi, menguji solusi, menganalisis hasil, dan menginterpretasikan hasil yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih. (Sugiyono, 2015:7)

- **Lokasi dan waktu penelitian**

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan pada seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat. Sumber data diperoleh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan www.djpk.depkeu.go.id. dengan periode penelitian tiga tahun terakhir yaitu 2017-2019.

- **Populasi Dan Sampel Penelitian**

Populasi ialah sebagai suatu kumpulan subjek, variabel, konsep atau fenomena. Kita dapat meneliti setiap anggota populasi untuk mengetahui sifat populasi yang bersangkutan (Morrison, 2012:19). Populasi penelitian ini adalah 13 Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat periode 2017-2019.

- **Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Data dalam penelitian ini adalah data eksternal. Data diperoleh melalui akses internet disitus Dirjen Perimbangan Keuangan www.djpk.depkeu.go.id. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi.

- Definisi Operasional Variabel

Belanja Modal (Y)

Menurut PP Nomor 71 Tahun 2010, Belanja Modal merupakan belanja Pemerintah Daerah yang manfaatnya melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah aset atau kekayaan daerah dan selanjutnya akan menambah belanja yang bersifat rutin seperti biaya pemeliharaan pada kelompok belanja administrasi umum.

Belanja Modal = Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mesin + Belanja Modal Gedung dan Bangunan + Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan + Belanja Aset Tetap Lainnya + Belanja Aset Lainnya.

- Pendapatan Asli Daerah (X1)

Menurut Yuwono dkk. (2005:107) menyatakan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan kas yang menjadi hak daerah dan diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan di dalam daerahnya sendiri.

PAD = HPD + RD + PLPD + LPS

Keterangan:

PAD = Pendapatan Asli Daerah

HPD = Hasil Pajak Daerah

RD = Retribusi Daerah

PLPD = Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah

LPS = Lain-lain Pendapatan yang Sah

- Dana Alokasi Umum (X2)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004).

- Dana Otonomi Khusus (X3)

Dana Otonomi Khusus merupakan dana yang dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah. Kewenangan yang dilakukan dalam hal mendengar aspirasi masyarakat, menetapkan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kebijakan, termasuk pengaturan dana untuk belanja modal.

Transfer Pusat DOK = PAPUA Rp 8 Triliun per/thn + PAPUA BARAT Rp 4 Triliun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

- Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dikarenakan nilai t hitung bertanda positif dan lebih besar dari nilai t tabel yaitu $2,126 > 1,68488$ serta nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,041 < 0,05$. Hal ini berarti semakin tinggi Pendapatan Asli Daerah yang dihasilkan, maka Belanja Modal yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah juga semakin meningkat.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Apriliawati, 2016; Aqnisa, 2016, Mawarni, dkk. (2013). Pendapatan Asli Daerah yang tinggi menyebabkan daerah tersebut menjadi mandiri sehingga kegiatan belanja daerah yang dikururkan dapat optimal, Lestari et al. (2016). Secara teoritis, Pendapatan Asli Daerah yang tinggi akan digunakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pengoptimalisasian komponen-komponen Pendapatan Asli Daerah akan mampu menambah kas daerah, sehingga

kucuran dana untuk belanja daerah dapat digunakan untuk infrastruktur dan kesejahteraan rakyat.

- Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil pengujian ini tidak mendukung hipotesis penelitian, dimana secara parsial Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal. Output menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.155 dengan nilai probabilitas (Sig.) = 0.878 lebih besar dari standar signifikan 0.05.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Kusnandar dan Siswanto (2012), Sularno (2013), Prasetya (2017), dan Verawaty, Merina & Sari (2015) menyatakan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap belanja modal. Hasil penelitian ini disebabkan karena rata-rata kabupaten/kota di Indonesia pada periode

penelitian ini memiliki proposi Dana Alokasi Umum yang terus meningkat dengan penurunan yang relatif kecil, Dana Alokasi Umum yang bersifat *block grant* penggunaannya diserahkan kepada daerah untuk kebutuhan daerah dan pelaksanaan otonomi daerah. Hasil yang di peroleh mengindikasikan bahwa Dana Alokasi Umum lebih banyak digunakan untuk membiayai belanja rutin seperti belanja pegawai.

- Pengaruh Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dikarenakan, nilai t hitung bertanda positif dan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu $6,346 > 1,99962$ serta nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Margaretha Turot (2017) yang menyatakan Dana Otonomi Khusus berpengaruh terhadap Belanja Modal dan Sumarjoko (2014) yang menjelaskan bahwa Dana Otonomi Khusus berpengaruh signifikan positif terhadap Belanja Modal APBD Provinsi Papua dan Papua Barat Tahun 2002-2012. Hal ini sejalan dengan kebijakan Undang-Undang No.11 Tahun 2006 bahwa Dana Otonomi Khusus digunakan untuk belanja pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur.

Wijaya (2017) berpendapat bahwa dengan Dana Otonomi Khusus yang tinggi, daerah dapat meningkatkan kualitas operasional daerah dengan mengoptimalkannya pada kegiatan investasi dari belanja daerah yang dikeluarkan pada periode tersebut.

Kebijakan-kebijakan dan rencana yang tepat seharusnya dilakukan oleh pihak pemerintah daerah untuk dapat memanfaatkan Dana Otonomi Khusus sebaik mungkin agar nantinya ketika OTSUS berakhir (tahun 2041), Papua Barat dapat menjadi daerah yang maju dan mandiri.

- Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan hasil pengujian secara simultan atau bersama-sama diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus berpengaruh secara simultan atau bersama-sama dan signifikan terhadap Belanja Modal. Dikarenakan, nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu $3,892 > 2,87$ dan nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,017 < 0,05$.

Hasil dalam penelitian ini dapat menunjukkan bahwa tingginya Belanja Daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Belanja Modal di pengaruhi oleh meningkatnya Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus sesuai dengan kebutuhan daerah. Oleh karena itu peran pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan

Asli Daerah dan juga pengalokasian Dana Alokasi Umum serta Dana Otonomi Khusus sangat penting untuk meningkatkan kegiatan Belanja Modal di Provinsi Papua Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal. Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Modal.

Dana Otonomi Khusus berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus secara simultan atau bersama-sama berpengaruh positif secara signifikan terhadap Belanja Modal.

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat untuk lebih meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui pengelolaan sumber pendapatan daerahnya sendiri agar daerah tidak bergantung pada subsidi atau bantuan dari pemerintah pusat.

Bagi pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi Papua Barat untuk lebih mengoptimalkan lagi pengalokasian Dana Alokasi Umum untuk menjamin keseimbangan antara kebutuhan fiskal dengan sumber-sumber fiskal.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar tempat penelitian dibedakan dari penelitian ini, sehingga lebih mengetahui tentang bagaimana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus pada pemerintah-pemerintah daerah lainnya.

REFERENSI

- Apriliawati, K. N. (2016). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 5 (2).
- Aqnisa, R., J. (2016). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Pengalokasian Belanja Modal pada Provinsi Jawa Tengah periode 2012-2013. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta: Surakarta.
- Bastian, Indra. (2003). Akuntansi Sektor Publik di Indonesia, Pusat Pengembangan Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- Halim, A. (2007). Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3. Jakarta: Salemba Empat.
- Hermawan, H. (2016). Dana Alokasi Khusus. www.djpk.depkeu.go.id/?p=1771. Diakses tanggal 3 Desember 2016.
- Iksari, P. (2015). Pengaruh Dana Alokasi Umum, dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota di DIY periode 2007-2014. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas PGRI Yogyakarta: Yogyakarta.
- Kuncoro, M. (2011). Perencanaan Daerah: Bagaimana membangun ekonomi lokal, kota dan kawasan?. Jakarta: Salemba Empat.
- Mamuka, Veronika & Inggriani Elim. (2014). Analisis Dana Transfer pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal EMBA*. Vol.2, No.1 : 646-655.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi offset.
- Made Ari Juniawan, Ni Putu Santi Suryantini, 2018. Pengaruh Pad, Dau Dan Dak Terhadap Belanja Modal Kota Dan Kabupaten Di Provinsi Bali. *E Jurnal Manajemen*, Volume 07 Nomor 03
- Margaretha Turot, (2017) "Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Belanja

- Modal sebagai variabel pemediasi”. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi. Yogyakarta
- Masayu Rahma Wati, C. M. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akuntansi* , 1, 63-76
- Morissan, A. (2012). Metode Penelitian Survei. Kencana: Jakarta.
- Ni Nyoman Widiasih, G. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* , 18, 2143-2171.
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Ketentuan Pengalokasian Dana Otonomi Khusus Di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2017
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010. Standar Akuntansi Pemerintahan. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Sudjana, N. dan Ibrahim. (2004). Penelitian dan Penilaian Pendidikan. Cetakan Ketiga. Sinar Baru Algesindo: Bandung.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yuwono dkk. (2005). *Penganggaran Sektor Publik*. Surabaya : Bayumedia Publishing